



Demokrasi dalam Pendidikan Islam

Raudatul Janna¹, Kasful Anwar², Sya'roni Sya'roni³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Alamat: Jln. Arif Rahman Hakim No. 111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, Jambi 36361

Email: raudhatuljannahkrt@gmail.com, kasfulanwarus@uinjambi.ac.id,
sya'roni@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: raudhatuljannahkrt@gmail.com

Abstract : *This paper discusses democracy in Islamic education, this paper aims to understand in depth the nature of educational democracy, namely educational democracy is a view that prioritizes obligations and rights, feelings and treatment by educational staff towards students in the educational process which includes 3 things, namely: respect for the dignity of fellow human beings, every human being has a change towards a healthy mind, and is related to common interests and welfare. Islamic educational democracy is the principle of implementing Islamic democracy in Islamic education. The democratic form of Islamic education is as follows: freedom for educators and students. Freedom here includes: (1) freedom to work; (2) freedom to develop potential; (3) freedom of opinion, equality for students in Islamic education, and respect for individual dignity in Islamic education. Next, to find out the democratic implementation of Islamic education through Integralistic education, Humanistic education, Pragmatic education, education that is abolished in Culture. The problem of democracy in Islamic education. The fundamental problem of Islamic education is the lack of clarity in the Islamic education paradigm. The ideological paradigm and the scientific paradigm are mixed in such a complex way that the scientific ideological paradigm develops. As a result, the tradition of creative, dynamic and open scientific thinking in the Islamic tradition, as well as the essence of revelation, is really difficult to develop. Democratic solutions in Islamic education: Changes that need to be made in Islamic education, namely emphasizing that Islamic educational institutions must design alternative, more democratic educational models that are in line with current development needs. The research method used is a basic theory method that uses data from materials that are library research, where the author reads and studies books or literature related to the problem being studied.*

Keywords: *Democracy, Islamic Education.*

Abstrak : Makalah ini membahas tentang demokrasi dalam pendidikan Islam, makalah ini bertujuan mengetahui mendalam hakikat demokrasi pendidikan, yaitu demokrasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan kewajiban dan hak dan perlakuan oleh tenaga kependidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan yang mencakup 3 hal yaitu: rasa hormat terhadap harkat sesama manusia, setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat, dan rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Bentuk demokrasi pendidikan Islam adalah sebagai berikut: kebebasan bagi pendidik dan peserta didik. Kebebasan di sini meliputi: (1) kebebasan berkarya, (2) kebebasan mengembangkan potensi, (3) kebebasan berpendapat. Persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam, dan penghormatan akan martabat individu dalam pendidikan Islam. Selanjutnya untuk mengetahui implementasi demokrasi pendidikan Islam melalui pendidikan integralistik, pendidikan humanistik, pendidikan pragmatik, pendidikan yang berakar pada budaya. Problematika demokrasi dalam pendidikan Islam. Masalah mendasar pendidikan Islam ialah tidak jelasnya paradigma pendidikan Islam. Antara paradigma idiologis dan paradigma ilmiah bercampur sedemikian komplek sehingga berkembang kemudian adalah paradigma ideology ilmiah. Akibatnya, tradisi pemikiran ilmiah yang kreatif, dinamis, dan terbuka dalam tradisi Islam sebagaimana hakikat wahyu benar-benar sulit berkembang. Solusi demokrasi dalam pendidikan Islam: Perubahan yang perlu dilakukan pendidikan Islam, yaitu menegaskan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mendesain model-model pendidikan alterntif yang lebih demokratis yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan sekarang ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode teori dasar yang menggunakan data dari bahan-bahan yaitu bersifat kepustakaan (*Library Research*), di mana penulis membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Kata kunci: Demokrasi, Pendidikan Islam

1. LATAR BELAKANG

Istilah demokrasi pada awalnya berasal dari Yunani yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersifat langsung dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini dikarenakan kondisi di negara tersebut sangat sesuai dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak dan luas wilayah yang tidak terlalu luas. Istilah demokrasi kemudian berkembang ke seluruh dunia, bahkan hampir seluruh negara di dunia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi karena lebih banyak menguntungkan dan suasana negara lebih aman dan kondusif.

Seiring dengan perkembangan zaman, istilah demokrasi berkembang dipakai bukan hanya untuk bidang pemerintahan saja, melainkan ke segala bidang dalam kehidupan sosial yang salah satunya adalah ke bidang pendidikan khususnya pendidikan Islam sebagaimana yang akan dibahas dalam penulisan ini. Asal mula munculnya konsep demokrasi adalah dari pemikiran mengenai sistem pemerintahan di negara Yunani Kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum masehi sampai abad ke-6 masehi. Pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik yang dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena negara Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota yang ruang lingkungannya tidak terlalu luas dan adanya jumlah penduduk yang hanya lebih kurang 300.000 orang dalam satu negara.

Keberadaan demokrasi dalam pendidikan Islam, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejarah/demokrasi dalam ajaran Islam dan demokrasi secara umum. Demokrasi dalam ajaran Islam secara prinsip telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah musyawarah. Kata demokrasi memang tidak ada terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits, karena kata demokrasi berasal dari Barat atau Eropa yang masuk ke peradaban Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Dede Rosyada istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada di tangan rakyat, mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substansif demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi. Sugarda Purbakawatja, yang dikutip oleh Ramayulis memberikan definisi bahwa demokrasi pendidikan, adalah pengajaran

pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. Menurut al-Abrasyi, mendidik harus membiasakan peserta didiknya untuk berpegang teguh pada kemampuan dirinya sendiri dan diberi kebebasan dalam berfikir tanpa terpacu pada pendapat orang lain, sehingga peserta didik bisa menentukan secara bebas masa depannya sendiri berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya.

Nurcholis Madjid membagi fitrah menjadi dua dimensi, *pertama, fitrah al-gharizah*, merupakan potensi dalam diri manusia yang di bawanya sejak lahir, meliputi akal, nafsu dan hati nurani. *Kedua, fitrah al-munazalah* adalah potensi luar yang membimbing dan mengarahkan *fitrah al-gharizah* untuk berkembang sesuai dengan fitrahnya melalui potensi pendidikan. Abuddin Nata menyatakan bahwa peserta didik yang masuk di lembaga pendidikan tidak ada perbedaan derajat atau martabat, karena penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dari pendidik. Kata Fazlur Rahman, apabila kita ingin membangun pendidikan Islam yang berkualitas, harus kembali kepada al-Qur'an dan Qur'an harus ditempatkan sebagai pusat intelektualisme Islam, Yahya Muhaimin yang dikemukakan terdahulu bahwa pendidikan berbasis keluarga (*familybased education*) dan pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*).

3. PEMBAHASAN

A. Hakikat Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata “*demos*” dan “*cratos*”, *demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti pemerintah. Maka demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat. Menurut Dede Rosyada yang istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada di tangan rakyat, mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substansif demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi.

Sugarda Purbakawatja, yang dikutip oleh Ramayulis memberikan definisi bahwa demokrasi pendidikan, adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa demokrasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan kewajiban dan hak dan perlakuan oleh tenaga kependidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan.

B. Demokrasi Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi diartikan sebagai dasar sebagai “Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara”. Demokrasi di samping pelaksanaan dan prinsip kesamaan sosial dan tidak adanya perbedaan yang mencolok, juga menjadi suatu cara hidup, suatu *way of life* yang menekankan nilai individu dan intelegensi serta manusia menunjukkan adanya hubungan sosial yang mencerminkan adanya saling menghormati, kerja sama, toleransi.

Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya intelegensi, kesehatan, dan keadaan sosial, dan sebagainya. Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik, serta juga dengan pengelolaan pendidikan.

Demokrasi pendidikan dalam pengertian yang lebih luas, patut selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dalam praktik kehidupan dan pendidikan mengandung tiga hal, yaitu:

1. Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia

Demokrasi pada prinsip ini dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan tidak memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya baik hubungan antara sesama peserta didik atau hubungan antara peserta didik dengan gurunya yang saling menghargai dan menghormati di antara mereka.

2. Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat

Dari acuan prinsip inilah timbul pandangan manusia itu harus dididik, karenanya sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak atau peserta didik untuk berpikir dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, sistematis dan komprehensif serta kritis sehingga anak atau peserta didik tadi memiliki wawasan, kemampuan dan kesempatan yang luas. Tentunya dalam proses seperti ini diperlukan sikap yang demokratis dan tidak terjadi pemaksaan pandangan terhadap orang lain. Sikap dalam pendidikan untuk mengajak setiap orang berfikir

lebih sehat seperti inilah akan melahirkan warga negara yang demokratis di pemerintahan yang demokrasi.

3. Rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama

Demokrasi di sini tidaklah berarti setiap orang dibatasi oleh kepentingan individu-individu lain. Atau dengan kata lain bahwa seseorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya. Karenanya warga negara yang demokratis akan dapat menerima pembatasan kebebasan itu dengan rela hati dan juga orang lain tentunya dapat merasakan kebebasan yang didapat setiap warga negara dari suatu negara yang demokrasi yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

C. Demokrasi Pendidikan Islam

Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Bentuk demokrasi pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan bagi pendidik dan peserta didik

Kebebasan di sini meliputi: kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan potensi, kebebasan berpendapat.

a. Kebebasan Berkarya

Menurut al-Abrasyi, mendidik harus membiasakan peserta didiknya untuk berpegang teguh pada kemampuan dirinya sendiri dan diberi kebebasan dalam berfikir tanpa terpaku pada pendapat orang lain, sehingga peserta didik bisa menentukan secara bebas masa depannya sendiri berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya.

b. Kebebasan dalam Mengembangkan Potensi

Nurcholis Madjid membagi fitrah menjadi dua dimensi, *pertama, fitrah al-gharizah*, merupakan potensi dalam diri manusia yang dibawanya sejak lahir, meliputi akal, nafsu dan hati nurani. *Kedua, fitrah al-munazalah* adalah potensi luar yang membimbing dan mengarahkan *fitrah al-gharizah* untuk berkembang sesuai dengan fitrahnya melalui potensi pendidikan.

c. Kebebasan dalam Berpendapat

Pendidik dituntut untuk menghargai pendapat peserta didik, peserta didik dituntut pula untuk menghargai pendapat pendidik dan sesama peserta didik, Karena menghargai pendapat merupakan salah satu kebutuhan dalam

melaksanakan pendidikan. Para pendidik dalam hal ini adalah membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mengemukakan isi hatinya dengan cara yang wajar, bermoral dan terpuji serta diridhai oleh Allah SWT sesuai dengan tahap-tahap perkembangan jiwanya. Pendidik bukan menekankan kebebasan pendapat pada peserta didik yang mengakibatkan jiwanya terbelenggu seperti adanya rasa cemas, gelisah dan kecewa selama berlangsungnya proses belajar mengajar.

2. Persamaan Terhadap Peserta didik dalam Pendidikan Islam

Pendidik harus mengajar anak orang yang tidak mampu dengan yang mampu secara bersama atas dasar penyediaan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik. Dalam pendidikan Islam tidak ditemukan sistem sekolah unggul karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi pendidikan Islam sebab bersifat diskriminasi terhadap peserta didik. Dalam pendidikan Islam yang ada adalah sistem pelayanan unggul, dimana setiap peserta didik dibimbing mengembangkan potensinya secara maksimal. Pendidik harus mampu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. Bagi peserta didik yang kurang aspiratif dalam belajar diberikan latihan-latihan remedial secara khusus. Sedangkan yang cerdas diberikan tambahan yang belum dipelajarinya.

3. Penghormatan akan martabat individu dalam pendidikan Islam

Demokrasi sebagai penghormatan akan martabat orang lain, maksudnya ialah seseorang akan memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Dalam proses pendidikan, pendidik menghargai pendapat peserta didik, tanpa membedakan dari mana asalnya. Pendidik dapat menimbulkan sikap saling menghargai pendapat diantara sesama peserta didik. Pendidik dalam memberikan ganjaran atau hukuman kepada peserta didik harus yang bersifat mendidik, karena dengan cara yang demikian akan tercipta situasi dan kondisi yang demokratis dalam proses belajar mengajar.

D. Implementasi Demokrasi Pendidikan Islam

Meminjam prinsip hakekat pendidikan Islam yang digunakan Hasim Amir, yang mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang idealistik, yakni pendidikan yang *integralistik, humanistik, pragmatik* dan *berakar pada nudaya kuat*. Tawaran Hasim Amir ini, yang di kutip A. Malik Fadjar, dapat digunakan sebagai

konsep demokratisasi pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan masyarakat Indonesia, yaitu:

1. Pendidikan *integralistik*

Pendidikan integralistik diharapkan dapat menghasilkan manusia (peserta didik) yang memiliki integralitas tinggi, yang dapat bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, menyatu dengan dirinya sendiri sehingga tidak memiliki kepribadian belah atau kepribadian mendua, menyatu dengan masyarakat sehingga dapat menghilangkan disintegrasi sosial, dan dapat menyatu dengan alam sehingga tidak membuat kerusakan, tetapi menjaga, memelihara dan memberdayakan serta mengoptimalkan potensi alam sesuai kebutuhan manusia.

2. Pendidikan *humanistik*

Pendidikan humanistik, diharapkan dapat mengembalikan peran dan fungsi manusia yaitu mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baik makhluk. Maka, manusia “yang manusiawi” yang dihasilkan oleh pendidikan yang humanistik diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk manusia berpikir, berasa dan berkemauan serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dapat mengganti sifat individualistik, egoistik, egosentrik dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat menghormati dan dihormati, sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan, sifat menghargai hak-hak asasi manusia, sifat menghargai perbedaan dan sebagainya.

3. Pendidikan *pragmatik*

Model pendidikan dengan pendekatan pragmatik diharapkan dapat mencetak manusia pragmatik yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, peka terhadap masalah-masalah sosial kemanusiaan dan dapat membedakan manusia dari kondisi dan situasi yang tidak manusiawi.

4. Pendidikan yang *berakar pada budaya*

Yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa, kelompok etnis, atau suatu masyarakat tertentu. Maka dengan model pendidikan yang berakar pada budaya, diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada diri sendiri, dan membangun peradaban berdasarkan budaya sendiri yang akan menjadi warisan monumental dari nenek moyangnya dan bukan budaya bangsa lain. Tetapi dalam hal ini bukan

berarti kita menjadi orang yang anti kemodernan, perubahan, reformasi dan menolak begitu saja arus transformasi budaya dari luar tanpa melakukan seleksi dan alasan yang kuat. Selanjutnya, dari keempat model yang dikemukakan di atas, dapat ditarik lagi pada desain model pendidikan Islam yang lebih operasional, yaitu: *Pertama*, mendesain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. *Kedua*, model pendidikan Islam yang tetap mengkhususkan pada desain “pendidikan keagamaan” seperti sekarang ini. Artinya harus mendesain ulang model “pendidikan Islam” yang berkualitas dan bermutu, *Ketiga*, model pendidikan agama Islam tidak dilaksanakan disekolah-sekolah formal tetapi dilaksanakan di luar sekolah, *Keempat*, desain model pendidikan diarahkan pada dua dimensi, yakni:

- a. Dimensi dialektika (horisontal), pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam ataulingkungan sosialnya. Manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia sekitarnya melalui pengembangan Iptek.
- b. Dimensi ketundukan vertikal, pendidikan selain menjadi alat untuk memantapkan, memelihara sumber daya alam, juga menjembatani dalam memahami fenomena dan misteri kehidupan yang abadi dengan Maha Pencipta. Berarti pendidikan harus disertai dengan pendekatan hati, artinya pendidikan harus membangun hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan. *Kelima* model pendidikan Islam yang dikemukakan di atas merupakan tawaran desain dan model pendidikan Islam yang perlu diupayakan untuk membangun paradigma pendidikan Islam yang lebih demokratis dalam menghadapi perkembangan perubahan zaman modern dan memasuki masyarakat madani Indonesia.

E. Problematika Demokrasi Pendidikan Islam

Masalah mendasar pendidikan Islam ialah tidak jelasnya paradigma pendidikan Islam. Antara paradigma ideologis dan paradigma ilmiah bercampur sedemikian kompleks sehingga berkembang kemudian adalah paradigam ideology ilmiah atau pseudo ilmiah. Akibatnya, tradisi pemikiran ilmiah yang kreatif, dinamis, dan terbuka dalam tradisi Islam sebagaimana hakikat wahyu benar-benar sulit berkembang. Problem metodologis dalam pendidikan Islam sebagaimana diatas sampai hari ini

belum pernah terselesaikan secara tuntas. Pembahasan mengenai problem tersebut selalu terhambat oleh aturan-aturan yang membatasi pemikiran ilmiah secara sempit dalam ortodoksi klasik. Dengan adanya pembatasan tersebut melahirkan pembakuan atau standarisasi sebuah pemikiran dan hanya satu pemikiran saja yang di anggap benar. Pemikiran yang berada di luar aturan tersebut termasuk murtad dan memasuki wilayah larangan.

Pemikiran dan karya intelektual yang segar dan dinamis yang mampu melakukan perubahan serta menjadi mobilitas social sebagaimana yang di harapkan masyarakat mustahil akan lahir bila idiologi ilmiah yang dianggap standart tersebut masih berperan secara vital serta mengawasi dan mengontrol secara ketat pengembangan dakwah Islam dan seluruh aktifitas pendidikan Islam yang meliputi proses pembelajaran dan penyusunan kurikulumnya. Pengembangan pemikiran dan pendidikan Islam pada umumnya masih berada pada proses pembersihan pemikiran Islam yang hanya terpusat pada hasil pemikiran klasik yang ortodok. Padahal hasil pemikiran tersebut tidak mutlak keberadaannya, serta kesemuanya belum tentu relevan bila di terapkan pada kondisi hari ini. Bukan berarti pula kita menolak keseluruhan dari pemikiran klasik tersebut, tetapi perlu dilakukan verifikasi dan kajian ulang hasil pemikiran tersebut sebagaimana kritikan yang dilakukan Al Ghazali terhadap filsafat empiris dan rasional. Karena yang dilakukan Al Ghazali merupakan bukti bila ia berfilsafat, dan penolakan yang dilakukan bukan pada metodologi filsafatnya tetapi hasil final dari filsafat empiris dan ilmiah tersebut.

Demokrasi dalam pendidikan Islam memiliki konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan, dimana pengelolaan pendidikan akan banyak di tentukan oleh pelaksana langsung, baik pengelolah, tenaga kependidikan, maupun masyarakat dalam menciptakan isi atau materi, sistem pembelajaran, termasuk pengembangan kualitas peserta didik. Disisi lain, demokrasi pendidikan akan berdampak pula pada aspek kurikulum, efesiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan terhadapperolehan pendidikan masyarakat.

Metode pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan Islam sebenarnya banyak terpengaruh oleh prinsip kebebasan dan demokrasi. Islam sendiri sejak kelahirannya selalu menyerukan adanya prinsip kebebasan dan persamaan dalam belajar, sehingga terbukalah jalan untuk belajar bagi semua orang, pintu masjid dan institute-institute terbuka untuk semua orang, tanpa memandang perbedaan antara si kaya dan si miskin, tinggi atau rendahnya kedudukan social seorang siswa, oleh karena didalam Islam

tidak ada kelebihan orang Arab dari yang bukan arab, kecuali dari taqwanya. Dalam menciptakan pendidikan Islam yang lebih demokratis dan dalam rangka menghadapi perubahan masyarakat global, ada beberapa persoalan mendasar internal pendidikan Islam yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu: Pertama harus mengikis habis wawasan sejarah pendidikan Islam yang tidak sesuai dengan gagasan yang di bawa Al- Qur'an, berupa persoalan dikotomik pendidikan Islam yang merupakan persoalan mendasar dari perkembangan pendidikan Islam selama ini. Pendidikan Islam harus dijauhkan dari dikotomik, menuju pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama.

Berkaitan dengan hal tersebut, yang pertama kali harus di lakukan adalah kemandirian dalam segala aspek. Dengan kemandirian tersebut, akan melindungi proses pengembangan pendidikan Islam dari berbagai intervensi yang akan memperkosakan proses pengembangan pendidikan Islam untuk tetap bersiteguh berdiri pada konsep yang murni dari Al-Qur'an dan Al-Hadis untuk memberdayakan bangsa yang mayoritas muslim ini. Selanjutnya, perlu pemikiran kembali tujuan dan fungsi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Artinya lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya berorientasi untuk memenuhi keinginan kepentingan akhirat saja dengan mengajarkan keterampilan beribadah saja. Hal tersebut masih di rasakan apabila pendidikan Islam di pandang dari dimensi ritual masih jauh dalam memberikan pengayaan spiritual, etika dan moral ilahiyah.

Memang diakui, bahwa peserta didik secara verbal kognitif dapat memahami ajaran Islam dan terampil dalam melaksanakannya, tetapi kurang menghayati kedalaman maknanya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus menjadikan pendidikannya tersebut sebagai tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama (spiritual ilahiyah), ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan atau kemahiran, seni dan budaya serta etika dan moral ilahiyah.

F. Solusi Demokrasi Dalam Pendidikan Islam

Perubahan yang perlu di lakukan pendidikan Islam, yaitu:

1. Membangun sistem pendidikan Islam yang mampu mengantisipasi kemajuan iptek untuk menghadapi tantangan dunia global menuju masyarakat indonesia baru yang di landasi dengan nilai-nilai ilahiyah, kemanusiaan (insaniyah), dan masyarakat, serta budaya.
2. Menata manajemen pendidikan Islam dengan berorientasi pada manajemen berbasis sekolah agar mampu menyerap aspirasi masyarakat, yang dapat

mendayagunakan potensi masyarakat, dan daerah (otonomi daerah) dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Islam yang berkualitas.

3. Meningkatkan demokratisasi penyelenggaraan pendidikan Islam secara berkelanjutan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat menggali serta mendayagunakan potensi masyarakat. Dari uraian diatas, menegaskan bahwa lembaga lembaga pendidikan Islam harus mendesain model-model pendidikan alternatif yang lebih demokratis yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan sekarang ini

4. KESIMPULAN

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad saw telah mempraktikkan demokrasi Islam dalam berbagai segi kehidupan; seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pendidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi seperti keadilan, kebebasan, persamaan, musyawarah, kerjasama, toleransi dan kemajemukan atau pluralitas. Semua nilai dan prinsip demokrasi juga terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang telah diimplementasikan kedalam kehidupan umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Dalam demokrasi pendidikan, diterapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam pelaksanaan praktik dan program pendidikan suatu lembaga yang terdiri dari *stake holder* seperti pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, kepala institusi atau lembaga pendidikan dan masyarakat guna mencapai tujuan yang sama sebagaimana yang terdapat dalam visi dan misi lembaga pendidikan. Melalui upaya penerapan nilai demokrasi pendidikan diharapkan dapat mampu mendorong manusia untuk menjadi individu yang aktif, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, produktif dan menghargai orang lain.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Munir. (1993). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Sipes.
- Al Abrasy, M. A. (1996). *Beberapa Pemikiran Pendidikan, Terjemah Syamsudin Asyrofi dkk.*
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Daulay, M. R. (2017). Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu KeIslaman*, 3(1), 91-110.
- Dede, R. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana.
- Fadjar, A. M. (1999). *Reorientasi Pendidikan Islam*. Fajar Dunia.
- Fuad, I. (2005). *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah, H. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Edisi Revisi*. Rajawali Pers.
- Madjid, N. (1993). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, cet. V*. Bandung: Mizan.
- Nata, A. (2000). *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pendidikan, D. (1990). *Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Ramayulis. (2015). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Romlah, S. (2018). Demokrasi Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam: Pancawahana*, 13(2), 1-11.
- Sudiro, M. I. (1995). Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern. In *Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern, Cirebon, Tanggal (Vol. 30)*.